

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman hak asasi perempuan yang meluas pada era sekarang menuntut adanya kesetaraan gender di semua aspek. Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia. Upaya untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran figur perempuan yang menempati kedudukan strategis di lingkup jabatan publik baik di ranah eksekutif, legislatif maupun pada ranah yudikatif (Phillips, 1995). Pembahasan pada penelitian ini mengenai daya juang dan daya tangguh politisi perempuan dalam kemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Pada Pemilu 2019 sebanyak 19,2% caleg perempuan terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Artikel Sweinstani (2023) memaparkan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan sebuah gambaran dari negara yang mengakui eksistensi perempuan dan juga keadilan dari negara tersebut (Phillips, 1995). Temuan lain menjelaskan terlibatnya perempuan dalam partisipasi politik secara aktif dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap politik di kalangan perempuan. Hadirnya figur perempuan dalam politik akan menjadi panutan bagi perempuan lainnya dan hal tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kehadiran perempuan di dalam politik itu menjadi hal yang penting (Sweinstani, 2023). Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan rasa keterwakilan dari

para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena dengan hadirnya figur politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pihak perwakilan yang paling mengerti mengenai aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan. Para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat berharap setiap aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan dapat tersampaikan melalui figur perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadirnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan lingkungan politik yang ramah gender.

Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari kebijakan afirmasi pemberian kuota perempuan sebanyak 30% kursi di parlemen. Pada periode 2019, kuota yang tersedia hanya dapat terpenuhi sebanyak 20% di tingkat nasional dan secara umum angkanya lebih rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, namun angka kehadiran perempuan di lembaga legislatif menunjukkan tren yang meningkat dari periode sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan tercipta sebuah peningkatan lingkungan politik yang ramah gender.

Pada Pemilu 2019 sebanyak 22 perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh anggota DPRD perempuan Provinsi Jawa Tengah yang terpilih selama tiga periode. Salah satu figur perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang sukses bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Jawa Tengah adalah Sri Marnyuni, pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sri Marnyuni merupakan petahana yang terpilih selama tiga periode berturut-turut, yakni pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Sri Marnyuni berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sri

Marnyuni merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 7 yang meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta¹.

Selain Sri Marnyuni yang mampu bertahan selama tiga periode, terdapat lima perempuan kader PDIP dan satu perempuan kader PKB. PDIP dan PKB merupakan partai politik dengan perolehan kursi peringkat 1 dan 2 di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tren perolehan kursinya meningkat. Hal menarik pada kasus Sri Marnyuni adalah keterpilihan Sri Marnyuni selama tiga periode berturut-turut melalui partai politik yang elektabilitasnya mengalami penurunan yakni PAN. Pada Pemilu 2019, PAN hanya mendapatkan 6 kursi (5%) dari total 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Angka tersebut turun dibandingkan Pemilu 2014, PAN berhasil mendapatkan 8 kursi (8%) dan Pemilu 2009 mendapatkan 10 kursi (10%) dari total 100 kursi DPRD Jawa Tengah. Selama tiga periode tersebut Sri Marnyuni menjadi satu-satunya perempuan anggota DPRD Jawa Tengah dari PAN dan satu-satunya wakil PAN di daerah pemilihannya. Tren penurunan elektabilitas PAN di Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara yang relatif stabil. Pada Pemilu 2014 perolehan suara Sri Maryuni sebesar 26.177 suara dan pada Pemilu 2019 sebesar 27.617 suara.

Berdasarkan temuan Kusuma (2022) menyatakan data hasil Pemilu yang diolah dan dirilis oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) menunjukkan posisi nomor

¹ Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Sri Maryuni mewakili Dapil 5 yang merupakan gabungan dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali. Pada Pemilu 2019 ada penataan Dapil menjadi Dapil 7 gabungan dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten Boyolali masuk Dapil 8 bersama Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

urut 1 sangat memengaruhi keterpilihan calon legislatif dan penentuan nomor urut calon dalam daftar calon masih ditentukan oleh segelintir elit partai. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, Sri Marnyuni mendapatkan nomor urut 2 namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterpilihan Sri Marnyuni.

Tabel 1.1

Track Record Sri Marnyuni pada kontestasi Pemilihan Umum

Periode	Pencalonan Legislatif	Status
Pemilu 1999	DPRD Kabupaten Klaten	Berhasil terpilih
Pemilu 2004	DPRD Provinsi Jawa Tengah	Mendapat nomor urut 3, berhasil mendapatkan suara terbanyak tapi gagal terpilih
Pemilu 2009	DPRD Provinsi Jawa Tengah	Mendapat nomor urut 1, berhasil terpilih
Pemilu 2014	DPRD Provinsi Jawa Tengah	Mendapat nomor urut 2, berhasil terpilih
Pemilu 2019	DPRD Provinsi Jawa Tengah	Mendapat nomor urut 2, berhasil terpilih

Sumber : Olahan penulis

Terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung seorang calon terpilih pada setiap kontestasi pemilu, yakni kuat-lemahnya kepemilikan modal ekonomi, modal sosial, dan modal politik atau faktor modalitas baik secara kumulatif ataupun setidaknya salah satunya (Indira dan Maryah, 2021; Gelgel dan Apriani, 2019). Studi Fitriyah dan Supratiwi (2015) menemukan faktor kekerabatan berperan dalam penguatan faktor modalitas, dan temuan Dalo (2010) menyatakan bahwa kemampuan mengkapitalisasi modalitas mengantarkan keterpilihan perempuan, sehingga permasalahan keterbatasan modalitas bukan menjadi permasalahan bagi setiap kandidat politik untuk memenangkan sebuah kompetisi elektoral.

Penelitian ini akan mencari faktor modalitas yang berperan pada kasus Sri Marnyuni terpilih selama tiga periode berturut-turut. Studi keterpilihan perempuan petahana untuk tiga periode sudah dilakukan oleh Muzadi dan Fitriyah (2020), namun kasusnya di tingkat kota. Studi tersebut menemukan keterpilihan berulang karena petahana mampu merawat konstituen melalui kerja tim sukses yang loyal. Keterpilihan caleg perempuan petahana untuk tingkat kabupaten juga menjadi studi Maharani, dkk (2020). Peneliti melihat urgensi penelitian serupa untuk caleg petahana di tingkat provinsi yang belum dilakukan. Pada tingkat provinsi tantangan yang dihadapi seorang calon lebih tinggi. Lingkup daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, sementara untuk tingkat DPRD kabupaten kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan. Hal ini berdampak pada jumlah pemilih dan rentetan tantangan lainnya, seperti kebutuhan makin besarnya keanggotaan tim sukses dan pembiayaan yang dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi modalitas dikapitalisasi dalam merawat konstituen sehingga Sri Marnyuni terpilih selama tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peminatan studi gender dan politik.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi kepada perempuan untuk maju sebagai caleg pemilu.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi parpol dalam pencalonan perempuan di pemilu.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang keterpilihan caleg perempuan petahana telah dilakukan oleh Maharani, dkk (2020) tentang “Modalitas RA. Anita Noerlinghati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019” penelitian ini menemukan beberapa faktor modalitas kuat yang dimiliki oleh RA. Anita Noerlinghati antara lain adalah modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Latar belakang dan pendidikan dari RA. Anita Noerlinghati tidak menjadi pendorong kemenangan, hal tersebut merupakan faktor modal kultural, namun kecakapan yang dimiliki ketika berhadapan dengan publik menjadi salah satu pendorong kemenangan. Melihat dari modal ekonomi, RA. Anita Noerlinghati mempunyai dorongan dana dari partai Golkar sebagai partai pengusung dalam kontestasi Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Modal sosial yang dimiliki RA. Anita Noerlinghati sendiri merupakan petahana pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2009, sehingga mempunyai

kepercayaan dari masyarakat. RA. Anita Noeringhati juga mempunyai hubungan interaksi sosial yang kuat dengan elit politik, masyarakat dan organisasi Kota Palembang. Selain itu, RA. Anita Noeringhati juga mempunyai penghargaan-penghargaan yang dimiliki dan hal tersebut termasuk ke dalam modal simbolik sebagai pendorong kemenangan yang dimiliki.

Keterpilihan perempuan petahana untuk tiga periode pada studi kasus DPRD kabupaten dilakukan oleh Muzadi dan Fitriyah (2020) tentang “Kemenangan *hattrick*: strategi keterpilihan Een Rusmiyati dalam pemilu legislatif 2019 di Kota Cirebon”. Penelitian tersebut menunjukkan faktor terpilihnya seorang petahana pada kontestasi pemilu dari beberapa keuntungan yang dimiliki oleh para caleg petahana. Masyarakat menganggap para caleg petahana mempunyai ‘kualitas’ yang lebih tinggi dibandingkan dengan para caleg pendatang, hal tersebut merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh caleg petahana. Masyarakat melihat sosok caleg petahana sebagai sosok yang sudah mengetahui ‘medan’ yang ada di pemerintahan. Keuntungan tersebut tidak selalu menjamin para caleg petahan untuk selalu terpilih pada pemilihan berikutnya, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 Kota Cirebon memperlihatkan terdapat beberapa caleg petahana yang tidak mendapatkan kursi di Pemilu 2019 Kota Cirebon. Dapat dikatakan, selain memiliki keuntungan sebagai petahana, para caleg juga perlu mempunyai strategi kemenangan untuk dapat menang pada kontestasi. Een Rusmiyati memenangkan kontestasi dengan cara melakukan mobilisasi sumber daya yang selama ini tercipta melalui fungsi representatif ketika menjabat di DPRD.

Faktor modalitas berperan penting dalam keterpilihan perempuan menjadi temuan Fitriyah dan Supratiwi (2015), dalam penelitiannya tentang "The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014". Temuan di dalam penelitian tersebut memperlihatkan faktor-faktor keterpilihan caleg perempuan di DPRD Jawa Tengah mayoritas menguasai modal politik, dengan menjadi pengurus partai para calon diberi nomor urut dan dapil strategis. Kepemilikan modal sosial sebagai pengurus organisasi sosial menjadikan para calon mempunyai kendaraan politik untuk memobilisasi dukungan suara. Kepemilikan modal ekonomi untuk biaya politik dan juga faktor kekerabatan dengan elit partai/sosial menciptakan akses modalitas.

Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dilakukan oleh Kartika, dkk (2018) tentang "Modal Politik Tjhai Chui Mie dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017". Penelitian ini menemukan bahwa Tjhai Chui Mie dapat membangun kekuatan personal lalu dikelola menjadi modal politik. Tjhai Chui Mie juga menghubungkan modal politik dengan modal sosial yang dimiliki sehingga dapat menjadi faktor kemenangan. Tjhai Chui Mie juga berhasil mematahkan hambatan-hambatan di kalangan perempuan yang terjun di dunia politik dalam konteks budaya patriarki. Penelitian yang dilakukan oleh Assidiq dan Triguswinri (2021) tentang "Kontestasi Politik Perempuan dalam Diskursus Gender dan Ekonomi Politik" ditemukan bahwa faktor yang paling determinan terpilihnya Tetti Rohatiningsih sebagai Pileg Cilacap 2019 di tengah adanya penerapan kuota 30 persen adalah faktor modalitas ekonomi.

Dalam konteks budaya patrarki, penelitian yang relevan dilakukan oleh Gelgel dan Apriani (2019) tentang “Rendahnya Keterpilihan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Bali”. Penelitian tersebut menemukan faktor yang mempengaruhi rendahnya keterpilihan perempuan di Bali pada Pemilu 2019 karena perpaduan sisi *demand* dan *supply*. Pada sisi *demand*, ada diskriminasi akses partai pada caleg laki-laki dan perempuan. Pada sisi *supply*, caleg perempuan punya keterbatasan atas (1) keuangan, (2) pengalaman politik, (3) jaringan sosial, (4) ruang gerak dan waktu serta, (5) motivasi berkarir politik. Hambatan lain yang biasa dijumpai oleh para perempuan yang ingin menjadi caleg yakni akar budaya patriarki yang kuat, tuntutan peran produktif dan reproduktif, tingkat kepercayaan diri yang kurang dalam politik dan kemampuan berpolitik (Sweinstani, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka faktor modalitas dan keuntungan petahana menjadi faktor yang akan digunakan untuk menjelaskan keterpilihan Sri Maryuni selama tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini fokus pada faktor yang berperan.

1.5.2 Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Politik Perempuan

Sebagai negara demokrasi, negara mendorong melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Salah satu pihak yang terlibat adalah partai politik. Partai politik sebagai salah satu elemen utama di dalam negara demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan berdemokrasi di Negara Indonesia. Partai politik merupakan salah satu kelompok secara terorganisir yang seluruh anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik agar dapat menjalankan program mereka (Budiarjo,

2010). Definisi lain dari partai politik menurut Carl J. Fredinich (Budiarjo, 2010) menyatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan adanya kekuasaan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap anggota partai yang bersifat adil dan riil. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama kemudian dibentuk secara terorganisir dan memiliki tujuan umum didirikannya partai politik untuk memperjuangkan, merebut, dan mempertahankan kekuasaan agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Partai politik mempunyai lima fungsi utama sebagai elemen yang berperan di dalam negara demokrasi, fungsi tersebut ialah: 1) Sosialisasi politik; 2) Partisipasi politik; 3) Rekrutmen politik; 4) Komunikasi politik; dan 5) Pemandu kepentingan (Almond, 1960). Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik terdapat satu fungsi yang menjadi sorotan utama yakni fungsi rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang mempunyai keterkaitan kuat dengan seleksi calon pemimpin yang tujuannya akan diarahkan menjadi pimpinan internal partai atau pemimpin di tingkat nasional (Budiarjo, 2010). Fungsi rekrutmen ini menjadi penting bagi partai politik untuk mencari kader berkualitas yang dinilai dapat menjadi calon pemimpin internal partai maupun nasional, apabila sebuah partai politik mempunyai kader politik yang berkualitas maka partai politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengajukan calon mereka dalam bursa kontestasi pemilihan di tingkat nasional (Budiarjo, 2010).

Rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik dengan tujuan untuk mencari kader-kader baru dan juga mencari sosok yang dinilai mempunyai potensi kuat untuk ikut dalam proses kontestasi politik. Partai politik tidak hanya sekedar mencari kader dan juga sosok untuk ikut di dalam kontestasi politik, namun partai politik juga melakukan kegiatan pencalonan anggota politik untuk masuk ke dalam sistem politik melalui tahapan pemilihan, seleksi, dan pengangkatan anggota partai politik (Fitriyah, 2020). Pippa Norris (Katz dan Crotty, 2006) menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen politik, di proses internal partai politik terdapat empat hal yang perlu diidentifikasi untuk menentukan calon tersebut, yakni:

1. Siapa calon yang dapat dikandidatkan?
2. Siapa yang melakukan seleksi?
3. Dimana calon diseleksi?
4. Bagaimana seorang calon dapat diputuskan?

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Pippa Norris (Pamungkas, 2011), yakni teori rekrutmen menjelaskan dalam sebuah rekrutmen dapat terbentuk proses yang baik apabila berlandaskan prestasi dan riwayat kandidat. Sebaliknya sebuah proses rekrutmen yang buruk dapat terbentuk apabila proses rekrutmen tersebut berlandaskan hubungan personal antar kandidat dengan partai politik.

Rekrutmen perempuan merupakan bagian dari rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Menurut Phillips (1995) menyatakan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang yang sudah berkembang di masyarakat tidak hanya sekedar gagasan-gagasan yang muncul dari

para kaum perempuan, namun juga berkaitan dengan sosok yang mewakili. Rekrutmen perempuan merupakan salah satu upaya untuk membentuk dan memperjuangkan lingkungan politik yang ramah bagi para kaum perempuan (Subono, 2012). Teori rekrutmen perempuan (Matland, 2002) menyatakan dalam proses rekrutmen yang harus dilalui oleh perempuan untuk masuk ke dalam ranah legislatif yakni perempuan perlu melewati tiga tantangan krusial terlebih dahulu yakni perempuan perlu menyeleksi dirinya sendiri, lalu diseleksi oleh partai sebagai kandidat dan diseleksi oleh pemilih. Sweinstani (2023) menyatakan banyak partai politik yang memasang perangkat maskulinitas kepada perempuan hal tersebut menjadi hambatan bagi perempuan untuk terjun ke dalam politik. Partai politik seringkali menciptakan kondisi akses *resources* kekuasaan perempuan menjadi terbatas. Hal tersebut menjadi kontradiksi di dalam praktik politik negara yang mana negara memberikan kebijakan afirmasi dalam politik sebagai urgensi yang penting, namun partai politik sebagai gerbang utama di dunia politik menciptakan hambatan itu sendiri. Pada konteks rekrutmen perempuan, Sweinstani (2023) menyatakan kerap dijumpai kondisi tidak adanya calon perempuan yang diusung oleh partai politik yang disebabkan tidak tersedianya calon perempuan. Padahal, sudah menjadi tanggung jawab partai politik dalam membentuk kader perempuan yang sesuai dengan kriteria partai politik. Menggunakan konsep proses *supply* dan *demand*, partai politik perlu membentuk kualitas kader perempuan (*supply*) sesuai dengan apa yang diinginkan dari para pemilih (*demand*). Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik yakni dengan (1) memberikan *treatment by pass* kepada calon perempuan pada tahap mekanisme perekrutan caleg, (2)

memberikan dana khusus untuk pendidikan politik perempuan dan, (3) melakukan *voluntary women quota*.

Berdasarkan empat isu dalam mekanisme rekrutmen politik diinternal partai politik, maka partai politik memainkan peran strategis dalam pencalonan perempuan, yakni apakah partai politik memutuskan mencalonkan perempuan pada nomor urut berapa dan daerah pemilihan apa. Undang-undang Pemilu di Indonesia mengatur kebijakan afirmasi melalui kuota 30% dalam pencalonan dan susunan nomor urut setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya terdapat satu calon perempuan. Perintah undang-undang adalah bentuk kuota legal, sedangkan keputusan partai dalam pencalonan perempuan tergantung pada adanya kebijakan afirmasi bersifat sukarela kepada perempuan. Surbakti (2007) menyatakan keuntungan mencalonkan perempuan, menurutnya adanya dukungan massa dari para kaum perempuan terhadap satu partai politik tertentu dapat tercipta karena (1) terdapat upaya dari para petinggi partai untuk menciptakan hubungan harmonis dengan para kaum perempuan, (2) banyak program yang dibentuk partai politik sesuai dengan kebutuhan dari para kaum perempuan, sehingga para petinggi partai politik dapat memberikan gambaran mengenai masa depan terhadap perempuan dapat tersampaikan melalui partai tersebut, dan partai politik dapat mengangkat isu gender yang sesuai di tengah masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Matland (2002), dalam rekrutmen politik juga ada ruang pemilih. Pemilih berperan dalam menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu legislatif. Dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka maka kerja politik untuk memobilisasi suara pemilih berada dipundak calon, bukan

lagi oleh partai politik seperti halnya dalam sistem pemilu proposional daftar tertutup. Fenomena ini disebut *personal vote* (Mellaz, 2018), yakni pemilih memilih calon bukan pilih partai sehingga kerja elektoral melekat pada calon yang bersangkutan.

Pada sistem ini penguasaan modalitas calon menjadi faktor penting. Ada banyak penjas tentang jenis-jenis modalitas dalam kontestasi elektoral. Marijan (2006) menggolongkannya atas tiga jenis modalitas, yakni modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Adanya dukungan partai politik dalam pencalonan seperti posisi nomor urut dalam daftar calon serta maju dari dapil yang menjadi potensi lumbung suara calon adalah bagian dari modal politik seorang kandidat.

1.5.3 Modal Ekonomi, Modal Budaya, dan Modal Sosial dalam Pemilu

Modal menurut Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1986) adalah kumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang digunakan sebagai dasar posisi dalam masyarakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan keanggotaannya di dalam kelas sosial masyarakat. Terdapat tiga jenis modal, modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Pengertian lebih lanjut mengenai modal ekonomi sendiri diungkapkan oleh Field (2003) menjelaskan bahwa modal ekonomi lebih mengarah pada kekuatan finansial yang dimiliki oleh setiap kandidat yang akan terjun dalam sebuah kontestasi politik. Field (2003) juga menyatakan modal ekonomi merupakan akar dari seluruh modal dalam kontestasi politik. Modal ekonomi merupakan modal utama yang perlu dimiliki oleh para kandidat kontestasi politik dan juga sebagai modal yang paling mengakar dengan modal-modal yang lainnya. Modal ekonomi menjadi kekuatan yang paling utama di dalam kontestasi politik, namun setiap

kandidat kontestasi politik perlu mempunyai modal budaya yang kuat seperti halnya bagaimana seorang kandidat tersebut berbicara. Modal budaya menurut Bourdieu (Pantouw, 2012) terdapat rentangan luas properti seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Masyarakat akan menilai gaya bicara dari setiap masing-masing kandidat yang mengikuti kontestasi politik, masyarakat juga akan menilai *attitude* dari setiap calon kandidat sehingga bila terdapat salah satu kandidat yang mengikuti kontesasi politik bersikap kurang baik di depan publik, maka hal tersebut menjadi blunder yang dilakukan oleh kandidat tersebut dan menyebabkan melemahnya modal budaya kandidat tersebut. Modal budaya memiliki banyak aspek di dalamnya sebagai hal yang akan dinilai oleh masyarakat seperti gaya bicara, *attitude*, pengetahuan, ijazah dan bagaimana kandidat tersebut dapat membangun sebuah komunikasi yang baik dengan masyarakat. Field (2003) juga menyatakan akumulasi sumber daya manusia yang berada pada pihak suatu kandidat atau kelompok yang mendukung kandidat tertentu merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari modal sosial yang perlu dimiliki oleh kandidat di dalam kontestasi politik. Penjelasan lain yang mengatakan bahwa modal sosial itu mencakup terbentuknya kepercayaan dari masyarakat dan juga norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Modal sosial menurut Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial merupakan modal yang paling utama di dalam struktur masyarakat karena modal sosial memegang peranan dalam pembangunan kehidupan masyarakat modern karena mencakup beberapa aspek seperti *human development*, *economy development*, kestabilan demokrasi, sosial dan politik. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai modal yang berada di tengah masyarakat

dan juga berkembang dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri merupakan bagian dari modal sosial tersebut. Pada saat sebuah kontestasi pemilihan umum berlangsung, maka para calon yang bermain di dalam kontestasi memerlukan sebuah modal utama yang kuat. Apabila seorang calon mempunyai modal yang lebih dari satu modal, maka peluang calon tersebut untuk memenangkan kontestasi tersebut menjadi lebih tinggi.

1.5.4 Strategi Politik dan Peluang Keterpilihan Petahana

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah rencana yang disusun dalam jangka waktu tertentu yang juga diikuti dengan beberapa eksekusi untuk mencapai tujuan dari rencana tersebut. Definisi lain mengenai strategi yang dikemukakan oleh Plano (1985) menyatakan strategi merupakan sebuah rencana-rencana yang komprehensif dan bersifat jangka panjang yang di dalamnya terdapat tindakan yang mengarah pada pencapaian dari tujuan yang sudah direncanakan. Teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2010) menjelaskan strategi politik merupakan penyusunan sebuah upaya untuk mencapai sebuah tujuan politik yang berupa mendapatkan kekuasaan, dengan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya kampanye sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik ketika kontestasi pemilu berlangsung dan tercipta suatu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Teori mengenai strategi politik oleh Prihatmoko (2008) menyatakan bahwa strategi politik merupakan seluruh rangkaian rencana yang diikuti oleh tindakan bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dan juga berhasil memenangkan kursi ketika pemilu. Berdasarkan definisi yang ada dikatakan bahwa strategi politik merupakan sebuah rencana yang

sudah disusun untuk jangka panjang secara terstruktur dan diikuti oleh upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan dari rencana tersebut supaya dapat meraih kemenangan di dalam kontestasi politik. Peter Schroder menyatakan terdapat empat macam strategi politik, yakni strategi politik ofensif yang bertujuan untuk memperluas pasar, strategi politik ofensif yang bertujuan untuk menembus pasar, strategi politik defensif yang bertujuan untuk mempertahankan pasar, dan strategi politik defensif yang bertujuan untuk menutup pasar (Schroder, 2010).

Strategi politik merupakan upaya yang dilakukan oleh para petahana hingga kini yang masih duduk dalam kursi pemerintahan. Keterpilihan petahana merupakan sebuah strategi lanjutan dari strategi politik yang menghasilkan terpilihnya kembali para petahana ketika berkontestasi pada pemilu. Strategi keterpilihan petahana dapat didefinisikan sebagai rencana atau teknik yang secara umum dilakukan oleh para kandidat petahana dalam kontesasi politik yang bertujuan untuk dapat terpilih kembali pada periode berikutnya dengan memanfaatkan jabatan politik diikuti oleh peninjauan terhadap kondisi masyarakat yang terkait (Muzadi dan Fitriyah, 2020). Teori mengenai strategi keterpilihan petahana seperti yang diungkapkan oleh Sheth dan Frazier (1982) mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh kandidat petahana untuk memenangkan kembali kursinya pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Proses penguatan
2. Proses bujukan
3. Proses rasionalisasi
4. Proses konfrontasi

Proses penguatan merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan untuk memenangkan kembali kursi para petahana pada periode berikutnya dengan mempertahankan seseorang melalui penunjukan sikap-sikap yang positif, proses bujukan merupakan upaya membujuk orang dengan tujuan mengubah sikap negatif menjadi positif, proses rasionalisasi merupakan satu tahapan untuk menjadikan sikap positif menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan proses konfrontasi merupakan cara untuk mengubah perilaku yang berkembang di tengah masyarakat secara luas (Muzadi dan Fitriyah, 2020).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Stoltz (2005) menyatakan bahwa daya juang merupakan suatu kemampuan dari individu untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan yang dialami dan memiliki keahlian untuk mengatasi kesulitan. Daya juang menurut Suryanti (2016) merupakan salah satu keahlian untuk menghadapi permasalahan. Seseorang yang mempunyai daya juang yang tinggi akan terus berupaya untuk mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik untuk mencapai sebuah tujuan utama. Grotberg (1999) menyatakan daya tangguh merupakan upaya individu untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi lebih kuat atas permasalahan atau tantangan yang dialami.

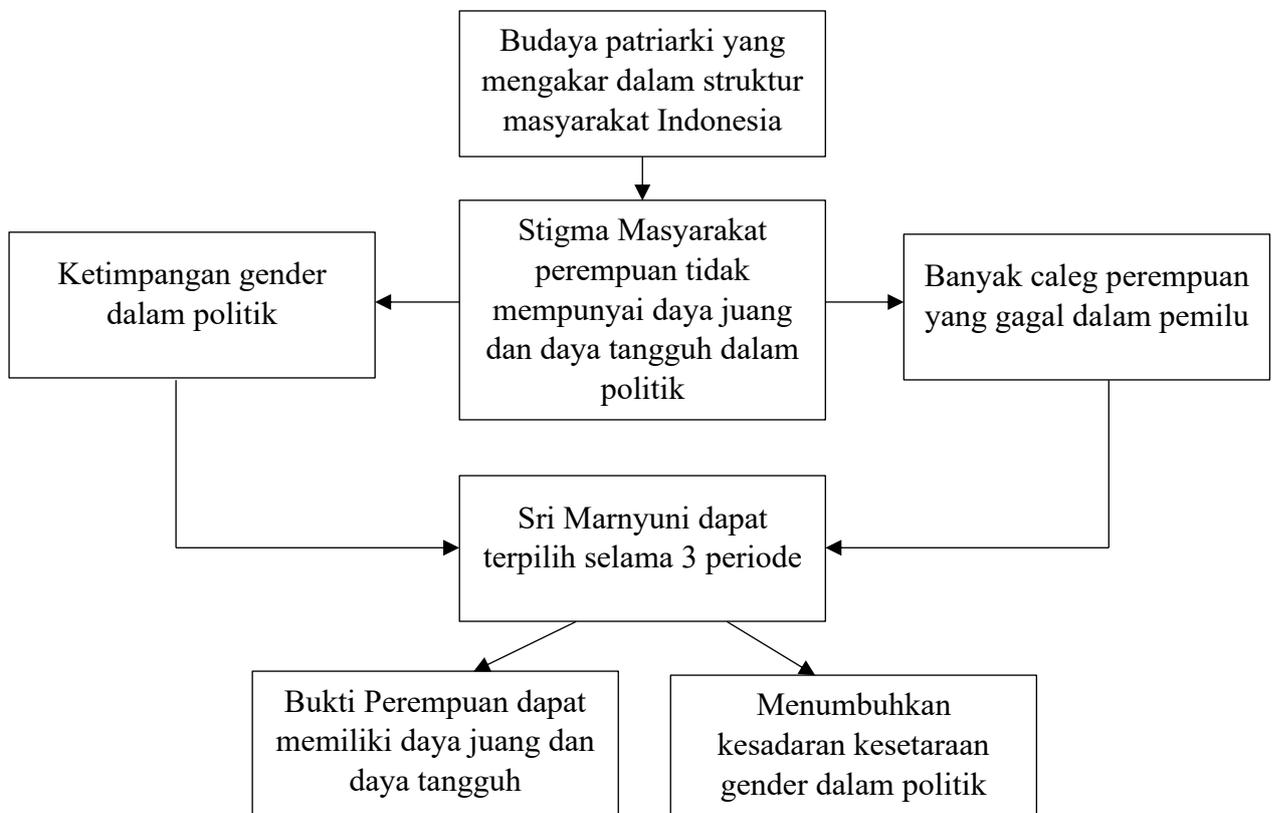
Stigma masyarakat yang menganggap perempuan tidak memiliki daya juang dan daya tangguh dalam kontestasi politik merupakan hasil dari budaya patriarki yang mengakar. Akar budaya patriarki yang kuat berdampak terhadap kuatnya ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Akar budaya patriarki yang kuat berdampak terhadap keterwakilan perempuan oleh anggota legislatif perempuan yang rendah. Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan

kebijakan afirmasi pemberian kuota 30% kepada caleg perempuan, namun kuota afirmasi masih belum dapat terpenuhi secara optimal.

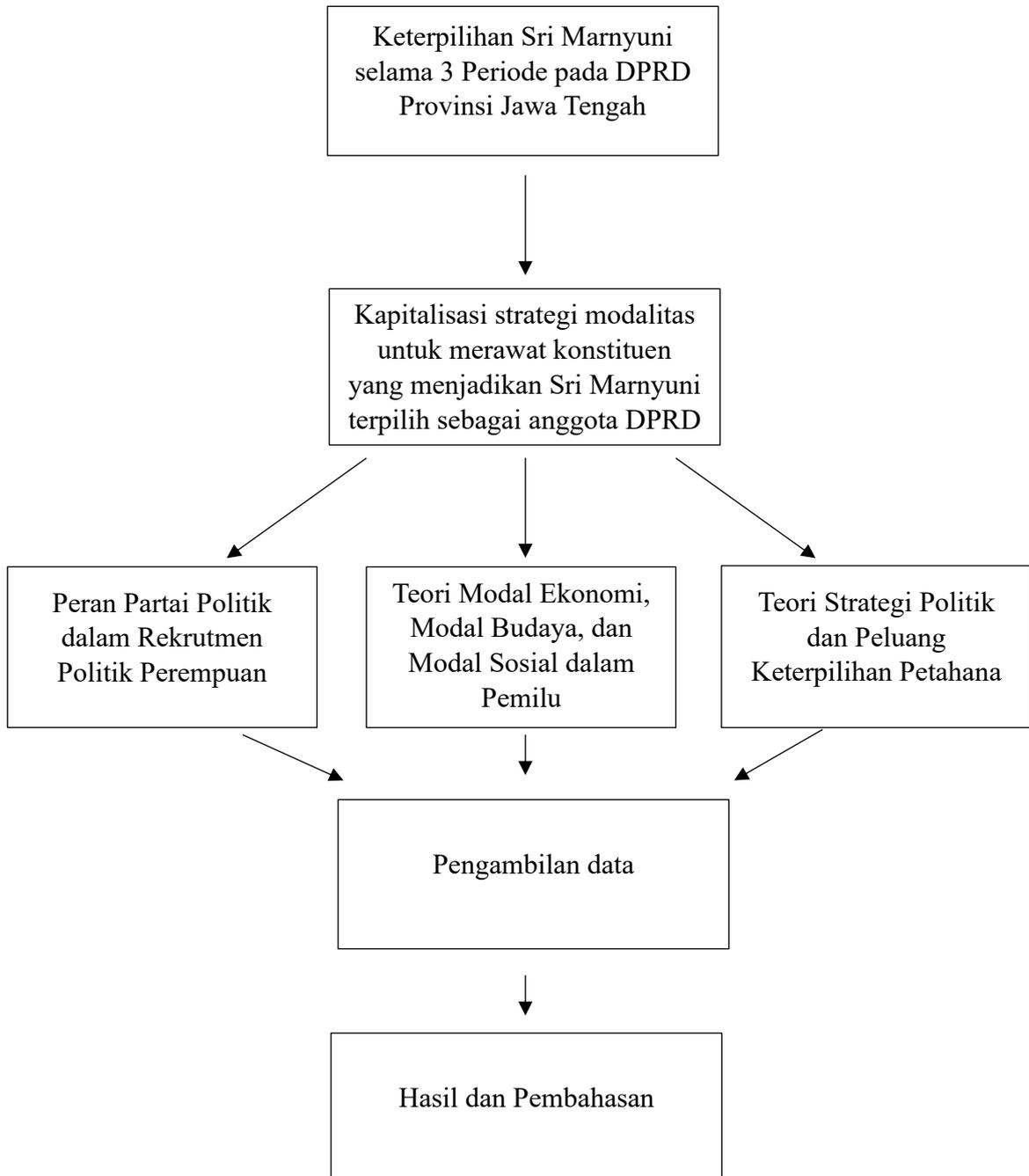
Salah satu figur perempuan yakni Sri Marnyuni, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terpilih selama 3 periode. Keterpilihan Sri Marnyuni dapat membuktikan perempuan dapat memiliki daya juang dan daya tangguh dalam kontestasi politik. Sosok Sri Marnyuni juga dapat menjadi sosok yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap politik di kalangan perempuan. Perempuan-perempuan dapat menjadikan Sri Marnyuni sebagai panutan dalam hal keterwakilan perempuan di ranah legislatif.

Bagan 1.1

Peta Konsep Relasi antara Stigma Masyarakat dengan Keterpilihan Sri Marnyuni



1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode berupa pendeskripsian suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dan metode ini bersifat komprehensif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendukung penggunaan metode tersebut maka peneliti akan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara secara mendetail. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pencarian data tertulis dan juga tidak tertulis untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif.

Creswell (2016) menuliskan bahwa penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mendorong peneliti untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada individu tertentu atau kelompok tertentu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung digunakan untuk penelitian mengenai masalah sosial, situasi dan fenomena yang terjadi, tingkah laku, masyarakat. Penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap kondisi yang terjadi mengenai objek yang diteliti sesuai fakta-fakta yang ada.

1.8.2 Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah yang lebih spesifik berada pada Dapil Jawa Tengah 7. Situs lain yang menjadi bahan dalam penelitian ini ialah tempat dari informan yang bersangkutan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Sri Marnyuni.

1.8.3 Informan Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan beberapa pihak yang akan menjadi informan pada penelitian ini yang dipilih secara purposif sesuai kebutuhan data dan secara aksidental pada salah satu informan penelitian. Informan penelitian ini yakni:

1. Sri Marnyuni
2. Pengurus PAN Jawa Tengah
3. Ormas/lembaga jaringan Sri Marnyuni
4. Pemilih di Dapil Sri Marnyuni, yakni wilayah Dapil Jawa Tengah 7 yang akan dilakukan pemilihan secara aksidental, yang didapatkan secara kebetulan dan sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

1.8.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

1. Data Primer

Data primer dijelaskan sebagai data yang ditemui langsung berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, untuk mendapatkan data primer, dapat melalui teknik wawancara ataupun observasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Bentuk dari data sekunder pada umumnya berbentuk berkas, dokumen, catatan dan data lainnya yang dapat digunakan peneliti untuk diolah dan dianalisis (Hasan, 2002). Penelitian ini

menggunakan data sekunder dari jurnal, dokumen, berita dari media cetak maupun *online* yang relevan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik yang digunakan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang mempunyai tujuan tertentu oleh dua pihak, yakni pihak pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara (Basrowi & Suwandi, 2008). Dalam teknik wawancara, terdapat tahapan yang menjadikan tahapan tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki teknik wawancara yakni berupa komunikasi secara langsung antara pihak yang mencari informasi dengan pihak yang memberikan informasi. Sehingga di dalam teknik wawancara terdapat tahapan tanya jawab untuk mendapatkan informasi sebagai data untuk penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada untuk menemukan data-data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 2014). Penggunaan teknik studi pustaka digunakan untuk menjadikan temuan penelitian lebih

komprehensif. Data-data di dalam teknik studi pustaka dapat berupa dokumen, buku, laporan, jurnal, arsip, dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian seperti yang dikemukakan menurut (Miles & Huberman, 1992) terdiri atas sejumlah tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan melakukan seleksi terhadap data-data yang sudah ditemukan. Penggunaan teknik analisis reduksi data dapat memilah data yang relevan dengan topik penelitian dan juga topik yang kurang relevan dengan topik penelitian, yang kemudian data yang ada akan menjadi lebih spesifik, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data. Teknik penyajian data dilakukan untuk mendeskripsikan data yang sudah direduksi melalui media tulisan. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga bersifat benar dan faktual.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Teknik pengambilan keputusan dan verifikasi merupakan salah satu tahapan lanjutan yang dilakukan setelah tahapan penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan deskripsi ulang mengenai data yang sudah disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir penelitian, akan dilakukan bentuk penarikan kesimpulan setelah jawaban dari seluruh objek permasalahan penelitian ditemukan di

dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti melakukan sebuah konfigurasi penuh penggabungan simpulan yang merupakan bagian ditariknya dari data-data yang sudah disajikan.

1.8.7 Validasi Data

Validasi data merupakan tahapan terakhir di dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memeriksa ulang terhadap keabsahan suatu data di dalam penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan penelitian tersebut (Barlian, 2016). Selain itu, Creswell (2016) menyatakan validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan untuk memeriksa akurasi hasil penelitian dengan menggunakan sejumlah prosedur tertentu. Menurut Creswell (2016) terdapat beberapa cara untuk melakukan proses validitas data antara lain:

1. Melakukan triangulasi terhadap sumber-sumber data yang berbeda agar dapat terbentuk sebuah justifikasi.
2. Melakukan *member checking* untuk menemukan keakuratan hasil penelitian.
3. Menulis deskripsi secara konkret mengenai hasil penelitian.
4. Menyajikan informasi yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif kontra terhadap tema tertentu.
5. Melakukan tanya jawab dengan peneliti lain untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat.